

belah pihak yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal perjanjian atau akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad tersebut menjadi tidak sah. Pemberlakuan denda pun tidak sesuai dengan DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 karena penerapannya, besaran denda tidak ditentukan di awal akad dan semua nasabah yang terlambat tidak diseleksi untuk dikenakan denda padahal menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 besaran denda ditentukan di awal akad dan yang menjadi kriteria untuk memberikan denda atas keterlambatan adalah nasabah yang mampu namun menunda pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran agar pihak BMT dapat menjelaskan dan mencantumkannya pada akad *mushārahah* tentang adanya denda berupa infaq apabila ada nasabah yang terlambat membayar angsuran dari waktu pembayaran yang telah ditentukan dan menyeleksi nasabah yang terlambat untuk dikenakan denda. Upaya untuk memperbaiki manajemen, dengan tidak membebankan kesalahan pihak BMT yang lupa menagih kepada nasabah dalam pembayaran angsuran sehingga nasabah terkena denda.